

## ABSTRAK

Seiring perkembangan ekonomi maka berkembang pula bentuk atau objek jaminan salah satunya adalah saham, menanggapi hal ini Bank Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan seperti Surat Keputusan Nomor 26/68/ Kep/ Dir/ 1993 tanggal 7 September 1993 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/I/UKU tanggal 7 September 1993 tentang Saham Sebagai Agunan Tambahan Kredit. Saham digunakan sebagai jaminan kredit karena saham termasuk surat yang mempunyai nilai ekonomis dan mudah dialihkan kepada pihak lain jika debitur ingkar janji atau wanprestasi. Saham yang digunakan sebagai jaminan bentuknya jelas berupa selebar kerja, hal ini berbeda dengan saham tanpa warkat, saham tersebut dalam bentuk sertifikat saham, saham tidak lagi berbentuk surat tetapi sudah dirubah menjadi data elektronik dengan diterapkannya system perdagangan tanpa warkat.

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum dikumpulkan melalui menelaah dan mempelajari peraturan perundang-undangan maupun literatur yang ada kaitannya dengan materi yang dibahas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

Dalam kaitannya dengan gadai, ketentuan yang diatur dalam B.W., hanya sebagai saham merupakan benda bergerak yang berwujud, karena itu jika saham tersebut adalah saham biasa pada umumnya maka pembebanannya dapat dilakukan secara langsung. Pada hakikatnya pembuat BW menghendaki atas eksekusi yang mudah dan langsung atas barang-barang yang digadaikan ketika debitur pemberi gadai wanprestasi. Ketentuan Pasal 1155 B.W., dapat digunakan sebagai dasar mengeksekusi saham tanpa warkat yang dijadikan sebagai jaminan gadai apabila debitur wanprestasi. Namun, ketentuan ini tidaklah mutlak, tetapi bisa dijanjikan lain oleh para pihak dan selama tidak bertentangan dengan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Dalam konteks, saham tanpa warkat masalahnya adalah menyangkut eksekusi gadai. Aturan BW mengenai Parate Executie tidak dapat diterapkan sepenuhnya walaupun tidak diperjanjikan oleh para pihak.

Kata kunci : Gadai saham, saham tanpa warkat, wanprestasi, eksekusi

## ABSTRACT

As the economic development of the developing collateral anyway shape or object one is stock, responded to this Bank Indonesia has issued several regulations such as Decree No. 26/68 / Kep / Dir / 1993 dated 7 September 1993 and Bank Indonesia Circular Letter No. 26 / I / BU dated 7 September 1993 on Shares As Collateral Loan Supplement. Shares used as collateral, including letters of credit as stocks that have economic value and is transferred to another person if the debtor broken a promise or default. Shares used as collateral in the form of a sheet shape is clearly working, it is different from the stock scrip, shares in the form of stock certificates, stock is no longer in the form of a letter but had converted into electronic data with the implementation of paperless trade system.

This study includes normative research, the approach taken is to approach legislation (statute approach) and approaches the concept (conceptual approach). Legal materials used primary legal materials and secondary legal materials. Legal materials collected through examining and studying the legislation and literature is related to the material covered.

The results showed that:

In relation to the pledge, the provisions set out in BW, just as the stock is moving tangible objects, therefore if these shares are ordinary shares in general it shall be expensed directly. In essence, the top maker of BW requires an easy and direct execution on goods pawned pledgor when the debtor defaults. The provisions of Article 1155 BW, can be used as a basis for executing the scrip shares are pledged as collateral lien if the debtor defaults. However, this provision is not absolute, but can be promised by the parties and do not conflict with the public order and decency. In context, the stock without paper the problem is related to the execution lien. BW rules regarding Parate executie can not be fully implemented, although not agreed by the parties.

Keywords: Pledge of shares, shares without script, default, execution